

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dalam hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa bidang e-Government Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi dapat sudah terlaksana dengan baik dan berhasil, walaupun masih ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya, dan jika dilihat dari ke-enam indikator dari proses evaluasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana yang terdapat dalam teori Dunn (2003:610) sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam program kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi dikatakan sudah efektif dan sudah terlaksana dengan baik sesuai target yang sudah ditentukan. Dalam kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat 6 Domain Arsitektur Utama yaitu domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur Keamanan SPBE dan domain arsitektur Layanan SPBE. Dari kesemua domain tersebut tentu saja dilaksanakan dan dikerjakan menggunakan media telekomunikasi digital sehingga dalam hal ini rencana kerja, dan rencana aksi tidak terlepas dari tujuan utama yang menjadi output dan outcome yaitu untuk meningkatkan kemampuan, kesiapan dan pemahaman semua individu didalam setiap OPD dan Stakeholder pemerintahan dalam menggunakan media telekomunikasi digital (aplikasi) yang sebagai produk dari SPBE.

Efektivitas dalam evaluasi program kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik itu terlaksana karena berhasil atau tidaknya kebijakan ini bergantung bagaimana kesiapan, kesadaran dan komitmen semua aparatur negara di Kota Bekasi dalam menggunakan media telekomunikasi digital untuk melakukan dan menunjang pekerjaan pemerintahan yang ada.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi Infromasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) sudah berhasil melaksanakan hal tersebut yang sesuai dengan rencana kerja dan rencana aksi yang disusun disetiap tahunnya.

2. Efisiensi dalam program kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi dapat dikatakan sudah efisien karena dengan minimnya jumlah personil di bidang e-Government Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi yang mengurus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini sudah menjalankan dan memaksimalkan pelaksanaan dan penggunaannya, sehingga dalam hal ini evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari indikator efisiensi sudah berjalan dengan memaksimalkan pelaksanaan rencana kerja dan rencana aksi meski personil yang dimiliki tergolong minim yang mesti mengurus banyak hal seperti meningkatkan nilai indeks evaluasi tahun depan (inovasi) untuk meningkatkan nilai indeks tersebut di tahun depan, mesti mengurus persoalan 6 domain arsitektur, mesti mengurus produk hukum yang di hasilkan baik berupa peraturan walikota maupun keputusan walikota serta yang paling penting dan fundamental yaitu kesiapan pemahaman setiap individu yang ada di pemerintahan dalam penggunaan media telekomunikasi digital (aplikasi).
3. Kecukupan dalam program kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi dapat dikatakan sudah ditahap kecukupan karena kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi sudah ditahap terlaksana yang dimana Kota Bekasi sudah hampir keseluruhan pelaksanaan kerja pemerintahan sudah menggunakan media telekomunikasi digital, serta selain itu peningkatan kemampuan kompetensi setiap individu di semua OPD selalu dilakukan

baik berupa sosialisasi, pelatihan dan BIKTEK yang bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja setiap individu yang ada.

4. Pemerataan dalam program kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi dapat dikatakan sudah merata dan adil karena dalam pelaksanaannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus megunakan media telekomunikasi digital, seperti yang ditetakan didalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 SPBE diperuntukan untuk tingkat pemerintah Kota dan Kabupaten sedangkan untuk tingkat bawahnya seperti kecamatan dan kelurahan hanya menerima tindak lanjut dari sebuah produk SPBE berupa aplikasi, dalam hal ini semua stakeholder di Kota Bekasi mendapatkan manfaat dari adanya SPBE, serta dari sisi masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari diterapkannya SPBE yaitu terwujudnya reformasi birokrasi yang akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan yang prima,*responsive*, menyeluruh dan mudah.
5. Responsivitas program kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandia (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi dapat dikatakan sudah responsive karena sudah adanya media untuk mensurvei kepuasan masyarakat yaitu SiSukma yang dibuat oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) selain itu ada juga media yang pernah digunakan yaitu FOC yang merupakan media pengaduan yang dibuat DISKOMINFOSTANDI yang pusat aduanya akan masuk di commend center, ada juga media yang dipergunakan yaitu SP4N Laporan yang merupakan media sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, untuk aplikasinya dikembangkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Ketepatan dalam kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SP BE) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

(DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi dapat dikatakan sudah tepat pada sasaran dan sangat bermanfaat untuk mempermudah kerja-kerja birokrasi pemerintahan, memberikan dampak positif juga untuk masyarakat yang menerima pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Sehingga dalam hal ini Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian selalu berupaya dalam meningkatkan nilai Indeks Evaluasi SPBE yang sebagai dasar dan tolak ukur ketepatan sasaran dalam pengembangan SPBE.

7. Adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi yaitu minimnya perhatian dari kepala daerah (walikota) yang menjadi kendala awal itu seperti kurangnya penekanan yang bisa membuat seluruh OPD mengetahui betapa pentingnya penerapan dan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dalam hal ini membuat tidak terbiasanya sumberdaya manusia yang ada di setiap OPD dalam penggunaannya, kendala selanjutnya kurangnya perhatian kepala daerah (walikota) dalam melihat potensi-potensi yang dapat merubah cara kerja pemerintahan yang bilamana anggaran yang dikeluarkan lebih banyak mungkin akan terciptanya percepatan penerapan dan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kendala selanjutnya yaitu kurangnya koordinasi, pemahaman dan pemaparan yang jelas kepada setiap OPD yang terlibat sehingga membuat adanya penumpukan tugas yang dipegang Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI).
8. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi lakukan terhadap kendala tersebut yaitu dengan setiap tahunnya melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap Tim Asesor Nasional agar mendapatkan sebuah jawaban dan rekomendasi penyelesaian dalam pencapaian nilai indeks di setiap indikatornya, agar hasil evaluasi tahun ini dapat menghasilkan

rekomendasi untuk meningkatkan SPBE tahun depan. Dari adanya hasil evaluasi dan rekomendasi barulah disusun rencana kerja dan rencana aksi tahunan yang akan dilakukan sehingga pencapaian yang diharapkan bisa ditingkatkan dari rekomendasi tersebut dapat tercapai dan berdampak memberikan perubahan. Karena tidak akan selesai dan tidak akan mencapai output dan outcome bila hanya mengandalkan anggaran besar bila tidak adanya pemaksimalan tindakan dari rencana aksi

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran terkait evaluasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada bidang e-Government Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian yang maksimal dari kepala daerah (walikota), karena dalam pelaksanaannya peran dan kontribusi walikota sangat banyak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat Kota, baik dalam hal memberikan arahan, memberikan intervensi kepada jajaran pemerintahan di Kota Bekasi dalam penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Perlu adanya perhatian lebih dari kepala daerah (walikota) dari sisi anggaran, karena percepatan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selain dari peningkatan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di jajaran pemerintahan, ada hal penting yang bertujuan untuk meningkatkan nilai indeks evaluasi SPBE tahun depan yang membutuhkan anggaran lebih contohnya seperti pembuatan Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang membutuhkan anggaran untuk memanggil tenaga ahli untuk membantu proses pembuatan, ada juga nanti pembuatan arsitektur-arsitektur SPBE lainnya yang terdapat didalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang terdapat 6 domain arsitektur.

3. Koordinasi, komunikasi dan komitmen antar instansi atau lembaga harus berjalan baik agar pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terlaksana sesuai dengan tujuan. Karena didalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari sisi peningkatan nilai indeks evaluasi tahunan membutuhkan peran serta dari sejumlah OPD, dan tidak lupa pula peran serta semua OPD dalam penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk berjalannya roda pemerintahan.
4. Perlu adanya peningkatan kualitas penyebaran informasi yang dilakukan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi khususnya penyebaran informasi kepada masyarakat luas dalam mengakses dan menggunakan aplikasi dan fitur-fitur pelayanan publik yang dapat masyarakat gunakan dengan mudah, penyebaran informasi mengenai setiap aplikasi yang dibuat dan diluncurkan oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi agar masyarakat mengetahui kegunaan untuk apa dan bagaimana mekanisme mengakses aplikasi tersebut, serta yang tidak kalah pentingnya peran serta masyarakat didalam memberikan tanggapan dan laporan bilamana ada pelayanan publik yang kurang baik.